PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rakhmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321746 Faks (0358) 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 22 Februari 2023

Nomor : 005/511/411.000/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Kepada
Yth. 1. Inspektur Daerah Kab. Nganjuk;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Staf Ahli Bupati;
4. Sekretaris DPRD Kab. Nganjuk;
5. Kepala Badan/Dinas Kab. Nganjuk;
6. Camat se-Kabupaten Nganjuk.

di-
NGANJUK

Dalam rangka peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis RB dan SAKIP bagi seluruh Perangkat Darerah di Kabupaten Nganjuk dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB).

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk hadir bersama Sekretaris dan Kepala Subbag Program Evaluasi/Jabatan Fungsional Perencana, besok pada :

Hari : Jumat s.d Sabtu
Tanggal : 3 s.d 4 Maret 2023
Waktu : sebagaimana jadwal terlampir
Tempat : Hotel The Royal Surakarta Heritage, Jl. Slamet Riyadi No.6, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Catatan :
1. Biaya akomodasi dan perjalanan dinas di bebankan pada Perangkat Daerah masing-masing;
2. Peserta yang ikut bimtek (hanya yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor peserta dari pantia);
3. Konfirmasi kehadiran dan pendaftaran perserta Bimtek paling lambat ***27 Februari 2023*** (CP : sdri. Siti Uswatun Hasanah, S.STP Nomor. HP 085232674333).

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

Tembusan :
Yth. Plt. Bupati Nganjuk (sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
Tanggal : 22 Februari 2023
Nomor : 005/511/411.000/2023

RENCANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN SAKIP
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.

No	Hari / Tanggal	Pukul	Acara	Penanggungjawab
1	Jum;at, 3 Maret 2023	12.30-13.00	Registrasi peserta	Panitia
		13.00-13.15	Laporan Panitia	Sekretaris Daerah
		13.15-13.30	Sambutan	Bapak Bupati
		13.30-13.45	Coffee break	Panitia
		13.45-17.15	Materi 1 : ”upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi”	Narasumber : Novan Kharisma S.S.lan (Kementerian PAN RB)
		19.00-19.15	Coffee break	Panitia
		19.15-22.00	Materi 2 : ”tematik reformasi birokrasi”	Narasumber : Budi Prawira, SE., MM. (Kementerian PAN RB)
2	Sabtu, 4 Maret 2023	08.00-08.15	Coffee break	Panitia
		08.15-11.15	Materi 1 : Penguatan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”	Narasumber : Budi Prawira, SE., MM. (Kementerian PAN RB)
		11.15-12.45	Materi 2 : ”Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”	Narasumber (Kementerian PAN RB)
		12.45-selesai	Penutupan	Panitia

** rundown acara sewaktu-waktu bisa berubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rahmad No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321746 Faks (0358) 321111
www.nganjukkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 094/151/411.000/2023

DASAR : Surat dari Bupati Nganjuk Nomor : 005 / 511 / 411.000 / 2023 tanggal 22 Februari 2022 Perihal Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Memerintahkan :

KEPADA :

1	Nama	:	AGUS FRIHANNEDY, S.Pd.,M.Si
	NIP	:	19640901 198703 1 013
	Pangkat	:	Pembina Tingkat I
	Jabatan	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

UNTUK : Menghadiri Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP pada :

Hari	;	Jum;at s/d Sabtu
Tanggal	;	3 s/d 4 Maret 2023
Jadawal	:	Terlampir
Tempat	:	Hotel The Royal Surakarta Heritage, Jl Slamet Riyadi No. 6 Kp .Baru Kec. Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah
Acara	:	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Demikian Surat Tugas ini untuk di laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal, 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Nganjuk

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19661227 198602 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Basuki Rahmad No 1 Nganjuk Kode Pos 644712
Telp (0358) 323388 Faks (0358) 321111
e-mail : www.nganjukkab.go.id

Nomor :
Kode No. :
No : 094/151/411.000/2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1	Pejabat Yang Memberi Perintah	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Nama Pegawai Yang Diperintah	AGUS FRIHANNEDY,S.Pd., M.Si
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c.Tingkat MenurutPeraturanPerjalanan	a. Pembina Tingkat I b. Kepala Dinas PRKPP Kab Nganjuk c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	Menghadiri Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP
5	Alat Angkut Yang Dipergunakan	AG 1443 VP
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	Nganjuk Surakarta, Jawa Tengah
7	a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	2 (dua) hari 3 Maret 2023 4 Maret 2023
8	Pengikut	-
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Dinas Perumanan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10	Keterangan lain lain	

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal, 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661227 198602 1 001

No.SPPD : 094/151/411.000/2023
Berangkat dari : Nganjuk
Pada tanggal : 3 - MARET - 2023
Ke : SURAKARTA .

II. Tiba di : SURAKARTA
Pada tanggal: 3 - MARET - 2023
Kepala

ASMARANY NURON QISTY

Berangkat dari : SURAKARTA
Ke : NGANJUK
Pada tanggal : 4 - MARET - 2023
Kepala

ASMARANY NURON QISTY

III. Tiba di :
Pada tanggal:
Kepala

Berangkat dari :
Ke :
Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di :
Pada tanggal:
Kepala

Berangkat dari :
Ke :
Pada tanggal :
Kepala

Tiba kembali di : Nganjuk
Pada tanggal : 4 - MARET - 2023
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661227 198602 1 001

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

Dokumentasi Menghadiri Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP tanggal 3 s/d 4 Maret 2023 di Surakarta, Jawa Tengah









PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl.Mastrip no.7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax(0358)330055e-mail: dinas.prkpp@nganjukkab. go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

I Pendahuluan

A Umum/latar Belakang

Reformasi Birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur;

Ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan I-4 mengoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat mikro menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dilakukan dalam rangka membangun good governance, namun banyak pihak yang merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Guna melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi. Disamping itu masih banyak lagi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Berikut beberapa pengertian atau istilah dalam reformasi birokrasi untuk menyamakan persepsi :

1. Reformasi Birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur;
2. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025;
3. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap

5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

B Landasan Hukum

Surat Dari Bupati Nganjuk Nomor 005/511/411.000/2023 tanggal 22 Februari 2023 Perhal Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Surat Dari Sekretariat Daerah Kab Nganjuk No/094/151/411.000/2023 tangal 24 Februari 2023

C. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk terutama Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk 2023 adalah memberi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo agar berjalan secara efektif, efesien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

II. Kegiatan Yang di Laksanakan

Kegunaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk Terutama dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Menetapkan proses perubahan dan sasaran hingga program dan rencana kebutuhan anggaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
2. Dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabuaten Nganjuk /OPD

III. Hasil Yang dicapai

Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, antara lain :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

IV, Kesimpulan dan Saran

Dengan adanya Bimtek Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi dan SAKIP diharapkan memujudkan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

V. Penutup

Demikian laporan Ini Untuk di periksa

Dibuat di : Nganjuk

Pada tanggal : 7 Maret 2023

Pelapor :

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd.,M.Si .....

NIP.196409 01 1 198703 1 013

1. Reformasi Birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur;

2. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025;

3. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap

4. (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

B Landasan Hukum

1. Surat Dari Bupati Nganjuk Nomor 005/511/411.000/2023 tanggal 22 Februari 2023 Perihal Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

2. Surat Dari Kepala Dinas No/090/25/411.315/2023 tangal 28 Februari 2023

C. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah yang baik dan bersih, efektif dan berdaya saing, memdorong pembangunan Nasional dan pelayanan publik.

II. Kegiatan Yang di Laksanakan

Kegunaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk Terutama dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Menetapkan proses perubahan dan sasaran hingga program dan rencana kebutuhan anggaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

2. Dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk /OPD

III. Hasil Yang dicapai

Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, antara lain :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang efektif dan efisien;

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl.Mastrip no.7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax(0358)330055e-mail: dinas.prkpp@nganjukkab. go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS
TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN SAKIP
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

I Pendahuluan

A. Umum/latar Belakang

Reformasi Birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi Pemerintah yang meliputi Organisasi, Tatalaksana, Peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur;

Ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan I-4 mengoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat mikro menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dilakukan dalam rangka membangun good governance, namun banyak pihak yang merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Guna melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi. Disamping itu masih banyak lagi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Berikut beberapa pengertian atau istilah dalam reformasi birokrasi untuk menyamakan persepsi :

IV, Kesimpulan dan Saran

Dengan adanya Bimtek Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi dan SAKIP diharapkan mewuujudkan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

V. Penutup

Demikian laporan Ini Untuk di periksa

Dibuat di : Nganjuk

Pada tanggal Maret 2023

Pelapor :

1. S U P A R D I ,SE .....
   NIP.19670812 199202 1 002
2. HERIYANTI,SE. M.SI .....
   NIP,1967 0812 200604 1 005
3. SUPARTINI.S.Sos .....
   NIP.19730308 200701 2 013
4. DEVITA TRI PURWANTI .....
5. AGUS KUSWANTO .....

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl.Mastrip no.7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax(0358)330055e-mail: prkppnganjuk@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/25/411.315/2023

DASAR : Surat dari Bupati Nganjuk Nomor : 005 / 511 / 411.000 / 2023 tanggal 22 Februari 2022 Perihal Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Memerintahkan :

KEPADA :

1	Nama	:	SUPARDI,SE
	NIP.	:	19670812 199202 1 002
	Pangkat/Gol	:	Pembina
	Jabatan	:	Sekretaris Dinas PRKPP Kab Nganjuk
2.	Nama	:	HERIYANTI,SE,M.SI
	NIP.	:	19670519 200604 2 006
	Pangkat/Gol	:	Pembina / IV A
	Jabatan	:	Perencana Ahli Muda
3.	Nama	:	SUPARTINI,S.Sos
	NIP	:	19730308 200701 2 013
	Pangkat/Gol	:	Penata Muda / III A
	Jabatan	:	Pengelola Kepegawaian
4.	Nama	:	DEVITA TRI PURWANTI
	NIP	:	-
	Pangkat/Gol	:	T H L
	Jabatan	:	Staf Dinas PRKPP Kab Nganjuk
5.	Nama	:	AGUS KUSWANTO
	NIP	:	-
	Pangkat/Gol	:	T H L
	Jabatan	:	Staf Dinas PRKPP Kab Nganjuk

UNTUK : Menghadiri Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP pada :

Hari	:	Jum'at - Sabtu
Tanggal	:	3 s/d 4 Maret 2023
Tempat	:	Hotel The Royal Surakarta Heritage, Jl Slamet Riyadi No. 6 Kp .Baru Kec. Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah
Acara	:	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Demikian Surat Perintah Tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal ; 28 Februari 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

AGUS FRIHANNEDY, S.Pd.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640901 198703 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl.Mastrip no.7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax(0358)330055e-mail: prkppnganjuk@gmail.com

Nomor :
Kode No. :
No : 090/25/411.315/2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1	Pejabat Yang Memberi Perintah	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, KawasanPermukiman dan Pertanahan Kabupaten. Nganjuk
2	Nama Pegawai Yang Diperintah	SUPARDI,SE
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c.Tingkat MenurutPeraturanPerjalanan	Pembina Sekretaris Dinas PRKPP Kab Nganjuk
4	Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP
5	Alat Angkut Yang Dipergunakan	AG 1257 VP
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	Nganjuk Surakarta Jawa Tengah
7	a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	2 (dua) hari 3 Maret 2022 4 Maret 2022
8	Pengikut	1. HERIYANTI,S.M.Si 2. SUPARTINI,S.Sos 3. DEVITA TRI PURWANTI 4. AGUS KUSWANTO
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Dinas Perumanan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10	Keterangan lain lain	

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal : 28 Februari 2023
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

AGUS FRIHANNEDY, S.Pd.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640901 198703 1 013

No.SPPD : 090/25/414.305/2023
Berangkat dari: Nganjuk
Pada tanggal: 3 - MARET - 2023
Ke: SURAKARTA

II.	Tiba di	: SURAKARTA	Berangkat dari	: SURAKARTA	
	Pada tanggal	: 3 - MARET - 23	Ke	: NGANJUK	
	Kepala		Pada tanggal	: 4 - MARET - 2023	
			Kepala		
		ASMADANY MIRON QUESTY		ASMADANY MIRON QUESTY	
III.	Tiba di	:	Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:	Ke	:	
	Kepala		Pada tanggal	:	
			Kepala		
IV.	Tiba di	:	Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:	Ke	:	
	Kepala		Pada tanggal	:	
			Kepala		

Tiba kembali di : Nganjuk
Pada tanggal : 4 - MARET 2023.
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

AGUS FRIHANNEDY, S.Pd.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640901 198703 1 013

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

Dokumentasi Menghadiri Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP tanggal 3 s/d 4 Maret 2023 di Surakarta, Jawa Tengah





